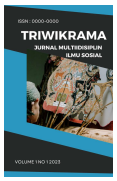
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No.2 Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



RANCANGAN *WEBSITE* SISTEM INFORMASI DESA KRAGAN (SIDKR) DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI DESA KRAGAN KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

Tazkiyatul Qolbi Masyihoh
Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received: June 2026
Revised: June 2026
Accepted: June 2026
Available online: June 2026

Korespondensi Email:
tazkiyatulqolbi.22037@mhs.unesa.ac.id

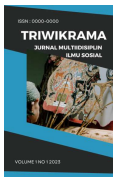
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Keterbukaan informasi publik di tingkat desa merupakan elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi Desa Kragan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, yang sebelumnya memiliki platform Sistem Informasi Desa (SID) dari Dinas PMD, namun tidak lagi digunakan karena antarmuka rumit, mekanisme login berlapis, dan pengelolaan terpusat sehingga desa tidak dapat mengelola informasi secara mandiri. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dan minimnya keterbukaan informasi yang mendukung good governance. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibuatlah rancangan website Sistem Informasi Desa Kragan (SIDKr) menggunakan PHP sebagai backend dan MySQL sebagai basis data, guna menghasilkan sistem yang efektif, efisien, dan mudah diakses. Tujuan pembuatan rancangan website ini adalah menciptakan platform digital yang mandiri, mudah diakses, dan berkelanjutan untuk mendukung keterbukaan informasi serta tata kelola desa yang baik. Penelitian menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model Waterfall, meliputi tahap analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Hasilnya berupa website SIDKr dengan lima modul publik profil desa, potensi desa, pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa, serta informasi desa (APBDes, berita, pengumuman, dan saran) yang dirancang intuitif tanpa prosedur login rumit, dan menu admin untuk mengelola APBDes, berita, serta informasi sesuai kebutuhan pengguna. Kelayakan sistem dibuktikan melalui usability testing dengan nilai 95% (perangkat desa) dan 95,2% (masyarakat), serta uji ahli TI 87,5% dan ahli pelayanan publik 92%, seluruhnya berkategori sangat layak. SIDKr diharapkan dapat meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, efisiensi layanan informasi publik, dan menjadi model pengembangan sistem informasi desa di Kecamatan Gedangan.

Kata Kunci: Sistem Informasi Desa, Website, E-Government, Desa Kragan Kabupaten Sidoarjo

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No.2 Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Abstract

Public information disclosure at the village level is an important element in realizing transparent and accountable governance. This research is motivated by conditions in Kragan Village, Gedangan District, Sidoarjo Regency, which previously had a Village Information System (SID) platform from the PMD Office, but it was no longer used due to its complicated interface, multilayered login mechanism, and centralized management, which prevented the village from managing information independently. This resulted in low community participation and minimal information disclosure to support good governance. To address this problem, a website design for the Kragan Village Information System (SIDKr) was developed using PHP as the backend and MySQL as the database, in order to produce an effective, efficient, and easily accessible system. The purpose of this website design is to create an independent, easily accessible, and sustainable digital platform to support information disclosure and good village governance. The research used the Research and Development (R&D) method with the Waterfall model, covering the stages of requirements analysis, design, implementation, testing, and maintenance. The result is the SIDKr website with five public modules village profile, village potential, village government, village community institutions, and village information (Village Budget/APBDes, news, announcements, and suggestions) designed to be intuitive without complicated login procedures, as well as an admin menu for managing the Village Budget, news, and information according to user needs. The feasibility of the system was demonstrated through usability testing with scores of 95% (village officials) and 95.2% (community members), as well as expert testing of 87.5% (IT experts) and 92% (public service experts), all categorized as highly feasible. SIDKr is expected to improve transparency, community participation, and the efficiency of public information services, and to serve as a model for the development of village information systems in Gedangan District

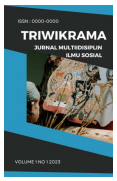
***Keywords**: Village Information System, E-Government, Kragan Village Sidoarjo Regency.*

1. PENDAHULUAN

Era transformasi digital telah mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pelayanan publik yang dulunya dilakukan secara manual kini beralih ke sistem digital sebagai dampak Revolusi Industri 4.0. Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menjadi landasan akselerasi digitalisasi layanan publik hingga tingkat pemerintahan terbawah, termasuk desa.

Desa sebagai entitas pemerintahan paling dekat dengan masyarakat memiliki kewajiban konstitusional untuk menyediakan sistem informasi yang terbuka dan dapat diakses publik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86 secara tegas mewajibkan setiap desa untuk membangun dan mengelola sistem informasi desa sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap badan publik, termasuk pemerintah desa, wajib menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat tanpa hambatan.

Desa Kragan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, merupakan desa dengan luas wilayah 73,53 Ha yang memiliki posisi strategis sebagai penghubung tiga kecamatan: Buduran, Gedangan, dan Sedati, dengan jumlah penduduk sekitar 2.500 jiwa. Meskipun memiliki potensi strategis, Desa Kragan menghadapi permasalahan serius dalam pengelolaan informasi publik. Berdasarkan observasi pada tanggal 12 Februari 2025 dan wawancara dengan perangkat desa, platform Sistem Informasi Desa (SID) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang sebelumnya digunakan telah ditinggalkan karena antarmuka yang rumit, mekanisme login berlapis



yang mengharuskan warga memasukkan NIK, RT, dan RW, serta pengelolaan terpusat yang tidak memungkinkan desa mengelola informasi secara mandiri.

Kondisi ini menciptakan kesenjangan informasi yang signifikan antara pemerintah desa dan masyarakat. Informasi anggaran (APBDes) hanya dipublikasikan melalui papan pengumuman fisik di kantor desa, sehingga tidak dapat diakses secara luas dan real-time. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mewajibkan publikasi APBDes secara terbuka. Rendahnya aksesibilitas informasi mengakibatkan lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat—tiga pilar utama good governance yang diamanatkan dalam berbagai regulasi.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Desa (SID) yang efektif mampu meningkatkan akses informasi secara signifikan. Pramana et al. (2025) membuktikan bahwa digitalisasi layanan desa di tiga desa tertinggal Bali berhasil mempercepat birokrasi dan meningkatkan kemudahan akses informasi bagi 82% warga. Ilham et al. (2024) menemukan peningkatan kemudahan akses informasi dari 3% menjadi 98% pasca implementasi SID di Desa Bendungan. Namun, penelitian yang secara khusus merancang website SID berdasarkan kebutuhan spesifik suatu desa untuk mendukung good governance masih terbatas, menjadi research gap yang dijawab oleh penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan merancang Website Sistem Informasi Desa Kragan (SIDKr) menggunakan model Waterfall sebagai solusi digital yang mandiri, mudah diakses, dan berkelanjutan untuk mendukung keterbukaan informasi serta mewujudkan tata kelola desa yang baik. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada perancangan SIDKr yang tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi secara langsung diarahkan untuk mewujudkan prinsip-prinsip good governance di tingkat pemerintahan desa.

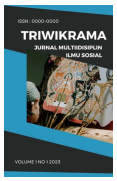
TINJAUAN PUSTAKA

Good Governance dan Keterbukaan Informasi Publik

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, serta partisipasi aktif masyarakat. United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan good governance sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan urusan negara secara bertanggung jawab, efektif, dan berkeadilan. Rifa'i & Arifin (2026) menegaskan bahwa good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik sebagai instrumen pengendalian kekuasaan.

Implementasi good governance bertumpu pada tiga pilar fundamental yang saling berkaitan. Pertama, transparansi mengacu pada keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat mengakses data dan kebijakan pemerintah secara mudah dan komprehensif (Nababan, 2021). Kedua, akuntabilitas merujuk pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan dan penggunaan sumber daya kepada publik (LAN RI, 2020). Ketiga, partisipasi masyarakat menekankan keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik (Perlaviciute & Squintani, 2020).

Dalam penelitian ini, keberhasilan SIDKr mewujudkan good governance diukur berdasarkan tiga indikator utama: (1) transparansi diukur dari kemampuan sistem menyediakan informasi APBDes, berita, dan pengumuman secara terbuka; (2) akuntabilitas diukur dari mekanisme pengelolaan konten yang terstruktur oleh perangkat desa; dan (3) partisipasi diukur dari tersedianya fitur saran dan masukan masyarakat kepada pemerintah desa.



E-Government dan Sistem Informasi Desa

E-Government merupakan paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. United Nations (2022) mendefinisikan e-government sebagai pemanfaatan TIK oleh sektor publik untuk meningkatkan penyampaian layanan, mendorong partisipasi masyarakat, serta memperkuat good governance melalui transparansi dan akuntabilitas. Fan et al. (2022) menambahkan bahwa e-government merupakan ekosistem sosial-teknis yang melibatkan warga dan lembaga pemerintah menggunakan platform elektronik untuk menciptakan nilai bagi penggunanya.

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan platform digital terintegrasi yang dirancang untuk mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi desa secara real-time, mencakup modul profil desa, perencanaan pembangunan, data kependudukan, dan laporan keuangan (Kemendesa, 2026). Kewajiban pengembangan SID diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86 dan dipertegas melalui Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa. Mardinata et al. (2023) membuktikan bahwa transformasi digital desa melalui SID dengan antarmuka user-friendly mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan kapasitas lokal dalam pengambilan keputusan

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D), yaitu metode penelitian yang bertujuan menghasilkan produk tertentu sekaligus menguji efektivitasnya (Sugiyono, 2019). Produk yang dikembangkan adalah rancangan website SIDKr berbasis web yang berfungsi sebagai wadah publikasi informasi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Desa Kragan. Metode R&D dipilih karena memungkinkan peneliti tidak hanya menganalisis permasalahan yang ada, tetapi juga merancang dan menguji coba solusi inovatif berbasis teknologi informasi secara terukur (Suwita et al., 2023).

Penelitian dilaksanakan di Kantor Desa Kragan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yang beralamat di Jalan Ambrali No. 96. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode: (1) observasi langsung ke kantor desa pada tanggal 12 Februari 2025; (2) wawancara mendalam dengan Bapak RH selaku Sekretaris Desa Kragan sebagai administrator SID, serta 5 warga desa sebagai pengguna akhir; dan (3) studi independen yang pernah dilaksanakan peneliti di lokasi yang sama, sehingga peneliti telah memiliki pemahaman mendalam tentang permasalahan yang ada.

Teknik pengembangan sistem menggunakan model Waterfall menurut Pressman (2015) yang mencakup lima tahapan berikut:

Tahap 1 – Analisis Kebutuhan: Identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Ditemukan bahwa SID dari Dinas PMD tidak efektif karena login berlapis, tampilan tidak menarik, dan pengelolaan terpusat. Warga mengharapkan sistem yang sederhana tanpa prosedur login, dapat diakses langsung, dan menyajikan informasi APBDes secara terbuka.

Tahap 2 – Desain: Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD) untuk memodelkan basis data, use case diagram untuk menggambarkan interaksi dua aktor (Administrator dan Masyarakat), serta flowchart untuk mendeskripsikan alur kerja setiap fitur utama sistem.

Tahap 3 – Implementasi: Pembangunan website SIDKr menggunakan PHP (Hypertext Preprocessor) sebagai backend yang berjalan di sisi server dan MySQL sebagai sistem manajemen basis data. PHP dipilih karena bersifat open source, ringan, dan handal untuk sistem informasi berbasis web yang membutuhkan pemrosesan data dinamis.

Tahap 4 – Pengujian: Dilakukan melalui tiga metode: (a) Blackbox Testing untuk memvalidasi fungsionalitas sistem; (b) Usability Testing menggunakan kuesioner skala Likert 1–5 yang disebarkan melalui Google Form kepada 4 perangkat desa dan 5 warga; dan (c) Uji Ahli oleh satu ahli teknologi informasi dan satu ahli pelayanan publik. Persentase kelayakan dihitung menggunakan rumus P = (Total Skor / Skor Maksimum) × 100%.

Tahap 5 – Pemeliharaan: Pemantauan dan perbaikan berkelanjutan yang mencakup corrective maintenance (perbaikan bug), adaptive maintenance (penyesuaian kebutuhan), perfective maintenance (peningkatan fitur), dan preventive maintenance (pencegahan masalah). Peneliti juga menyiapkan video tutorial, buku panduan, dan layanan kontak WhatsApp sebagai dukungan jangka Panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

4.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Bapak RH (Sekretaris Desa Kragan) pada 12 Februari 2025, teridentifikasi tiga permasalahan utama yang menghambat efektivitas sistem informasi desa. Pertama, website SID dari Dinas PMD telah ditinggalkan akibat antarmuka yang rumit dan mekanisme akses berlapismasyarakat harus membuka website PMD terlebih dahulu, memilih kecamatan, baru menemukan informasi desa. Kedua, hak akses SID hanya diberikan kepada sekretaris desa, sehingga pengelolaan informasi publik terpusat pada satu individu tanpa mekanisme pendelegasian yang jelas. Ketiga, tidak ada platform digital mandiri yang memungkinkan transparansi APBDes, berita, dan pengumuman desa secara real-time.

Lima warga yang diwawancarai menyampaikan keluhan serupa terkait kerumitan prosedur login yang mengharuskan pengisian NIK, RT, dan RW. Warga mengharapkan sistem yang dapat langsung diakses tanpa prosedur yang membingungkan. Berdasarkan temuan ini, kebutuhan sistem dikelompokkan menjadi: (a) kebutuhan fungsional—tampilan publik tanpa login, modul Profil Desa, Potensi Desa, Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), serta Informasi Desa (APBDes, berita, pengumuman, saran), dan dashboard admin untuk pengelolaan konten mandiri; (b) kebutuhan non-fungsional—responsivitas antarmuka, kecepatan akses, keamanan login administrator, dan kemudahan penggunaan tanpa pelatihan teknis mendalam.

4.2 Desain dan Implementasi Website SIDKr

Tahap desain menghasilkan tiga dokumen teknis utama. Entity Relationship Diagram (ERD) memvisualisasikan lima entitas basis data yang saling berelasi: Profil Desa (sejarah, geografis, visi-misi), Potensi Desa (SDA, SDM, kelembagaan), Pemerintahan (struktur organisasi, perangkat desa), Lembaga Kemasyarakatan Desa (Posyandu, PKK, RW, RT, Karang Taruna, LPMD), dan Informasi Desa (APBDes, berita, pengumuman, saran). Use case diagram mengidentifikasi dua aktor: Administrator dengan hak akses penuh untuk mengelola seluruh konten, dan Masyarakat dengan hak akses untuk melihat informasi publik. Flowchart menggambarkan alur proses dari autentikasi administrator hingga navigasi publik tanpa login.

Pada tahap implementasi, website SIDKr dibangun menggunakan PHP sebagai backend dan MySQL sebagai basis data. Antarmuka publik dirancang tanpa prosedur login sehingga masyarakat dapat langsung mengakses informasi desa. Lima modul publik berhasil diimplementasikan: (1) Modul Profil Desa menampilkan sejarah, kondisi geografis, visi-misi, serta potensi desa; (2) Modul Potensi Desa menyajikan potensi umum, SDA, SDM, kelembagaan, dan sumber daya lainnya; (3) Modul Pemerintahan menampilkan struktur organisasi, data perangkat desa, dan lembaga pemerintahan; (4) Modul LKD menampilkan informasi Posyandu, PKK, RW, RT, Karang Taruna, dan LPMD; serta (5) Modul Informasi Desa yang menjadi inti transparansi—menyajikan APBDes, berita

kegiatan, pengumuman, dan fitur saran warga secara real-time. Dashboard administrator dilengkapi dengan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk seluruh modul, serta mekanisme autentikasi login yang aman

4.3 Hasil Pengujian Sistem

Pengujian Blackbox Testing memvalidasi bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan yang ditetapkan. Selanjutnya dilakukan pengujian kelayakan secara komprehensif melalui empat metode. Hasil selengkapnya disajikan pada Tabel 1.

Jenis Pengujian	Responden	Skor Total	Skor Maks	Persentase	Kategori
Usability Testing (Perangkat Desa)	4 perangkat desa	190	200	95,0%	Sangat Layak
Usability Testing (Masyarakat)	5 warga	238	250	95,2%	Sangat Layak
Uji Ahli Teknologi Informasi	1 ahli IT	70	80	87,5%	Sangat Layak
Uji Ahli Pelayanan Publik	1 ahli	69	75	92,0%	Sangat Layak

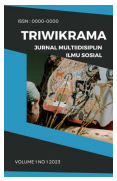
Tabel 1. Hasil Pengujian Kelayakan Website SIDKr
Sumber: peneliti

Hasil usability testing menunjukkan skor 95% dari perangkat desa dan 95,2% dari masyarakat—keduanya berada pada kategori Sangat Layak (rentang 81%–100%). Perangkat desa memberikan penilaian tertinggi pada fitur pengelolaan APBDes dan kemampuan publikasi informasi secara real-time. Masyarakat menilai tampilan beranda, struktur navigasi, dan kemudahan akses tanpa login sebagai keunggulan utama SIDKr dibandingkan platform SID sebelumnya. Ahli teknologi informasi memberikan nilai 87,5% dengan catatan perlunya peningkatan responsivitas pada perangkat mobile. Ahli pelayanan publik memberikan nilai 92% dengan menekankan keunggulan SIDKr dalam mewujudkan aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa

4.4 Kontribusi SIDKr terhadap Good Governance di Desa Kragan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis, SIDKr terbukti berkontribusi nyata dalam mewujudkan tiga pilar good governance di Desa Kragan. Dari aspek transparansi, masyarakat kini dapat mengakses informasi APBDes, berita, dan pengumuman desa secara terbuka tanpa prosedur login berlapis seperti pada sistem sebelumnya. Penyajian APBDes secara digital mengatasi keterbatasan papan pengumuman fisik yang hanya dapat diakses oleh masyarakat yang datang langsung ke kantor desa. Ini selaras dengan temuan Russo Rumimpunu et al. (2021) bahwa e-government memungkinkan masyarakat memperoleh informasi publik lebih cepat dan mudah melalui platform digital.

Dari aspek akuntabilitas, pemerintah Desa Kragan kini dapat mempublikasikan laporan keuangan dan kegiatan desa secara real-time melalui dashboard admin yang dikelola secara mandiri. Pengelolaan konten yang dapat dilakukan oleh lebih dari satu perangkat desa mengatasi masalah pemusatan akses pada satu individu, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip akuntabilitas (LAN RI, 2020). Dari aspek partisipasi, fitur saran warga membuka saluran komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah desa, memungkinkan keterlibatan aktif warga dalam



tata kelola desa—sejalan dengan temuan Yunita & Idrus (2023) tentang pentingnya partisipasi substantif dalam pembangunan desa.

Kemandirian sistem merupakan keunggulan strategis SIDKr dibandingkan platform SID terdahulu. SIDKr tidak bergantung pada sistem induk eksternal, sehingga keberlanjutan layanan informasi publik dapat terjamin tanpa ketergantungan pada pihak lain. Temuan ini sesuai dengan rekomendasi Sulistyowati et al. (2021) bahwa SID yang efektif harus mampu dioperasikan secara mandiri oleh perangkat desa dengan komitmen kepala desa yang kuat. Selain itu, antarmuka yang sederhana dan intuitif menjawab kebutuhan masyarakat dari berbagai tingkat literasi digital, termasuk kelompok rentan dan warga lanjut usia, sebagaimana dinilai positif oleh ahli pelayanan publik.

Tahap pemeliharaan yang telah disiapkan secara terstruktur—mencakup video tutorial, buku panduan, dan layanan kontak langsung—memastikan keberlanjutan operasional SIDKr dalam jangka panjang. Hal ini penting mengingat keterbatasan kapasitas SDM di tingkat desa merupakan salah satu faktor kegagalan sistem informasi desa sebagaimana diidentifikasi oleh Sulistyowati et al. (2021). SIDKr diharapkan dapat menjadi model pengembangan sistem informasi desa yang dapat direplikasi di desa-desa lain di Kecamatan Gedangan dan bahkan di tingkat yang lebih luas

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

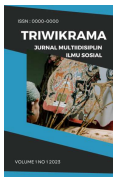
Penelitian ini berhasil merancang Website Sistem Informasi Desa Kragan (SIDKr) menggunakan metode R&D dengan model Waterfall melalui lima tahapan: analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. SIDKr dibangun menggunakan PHP dan MySQL dengan lima modul publik yang dapat diakses langsung tanpa prosedur login berlapis, serta dashboard administrator untuk pengelolaan konten secara mandiri.

Hasil pengujian kelayakan secara konsisten menunjukkan kategori Sangat Layak dari seluruh aspek: usability testing perangkat desa (95%), masyarakat (95,2%), uji ahli teknologi informasi (87,5%), dan ahli pelayanan publik (92%). SIDKr terbukti mampu mewujudkan tiga pilar good governance: (1) transparansi melalui publikasi APBDes dan informasi desa secara real-time dan terbuka; (2) akuntabilitas melalui pengelolaan konten terstruktur dan terdokumentasi oleh perangkat desa; dan (3) partisipasi masyarakat melalui fitur saran dan kemudahan akses tanpa hambatan prosedural.

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis berupa model SID mandiri yang dapat dioperasikan desa tanpa ketergantungan pada sistem eksternal, serta kontribusi teoritis berupa kerangka pengukuran good governance di tingkat desa melalui indikator transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang terukur. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan pengembangan responsivitas mobile SIDKr, integrasi dengan sistem informasi kecamatan, serta kajian dampak jangka panjang terhadap peningkatan kepercayaan publik di Desa Kragan.

Saran

1. Sistem Informasi Desa Kragan Hanya Bisa diakses menggunakan internet, jika tidak terhubung dengan jaringan internet tidak bisa di akses.
2. Sistem informasi desa belum responsif terhadap mobile, jika SIDKr di tampilkan di mobile tampilan masih belum rapi karena tampilan responsif desktop.
3. Pada video penggunaan atau pengenalan SIDKr untuk ditambahakan musik instrumental sebagai backsound dengan suara yang pelan supaya tidak mengganggu saat video sedang menjelaskan mengenai SIDKr
4. Apabila ditemukan masalah dalam penggunaan, maka pengguna (Admin) bisa menghubungi peneliti untuk segera bisa diperbaiki.



DAFTAR PUSTAKA

Aroral, H. K. (2021). Waterfall Process Operations in the Fast-paced World: Project Management Exploratory Analysis. International Journal of Applied Business and Management Studies, 6(1), 91–99.

Burhani, I., Soderi, A., & Karno, D. (2025). Perbandingan Metodologi SDLC Waterfall dan Agile Dalam Rencana Pengembangan Sistem Informasi Kepatuhan. Journal of Informatics Management and Information Technology, 5(2), 147–154. https://doi.org/10.47065/jimat.v5i2.489

Fan, M., Epadile, M., Qalati, S. A., & Qureshi, N. A. (2022). The Effects of eGovernment Efficiency on Subjective Wellbeing. Frontiers in Psychology, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.768540

Gil-Garcia, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2018). Digital government and public management research: finding the crossroads. Public Management Review, 20(5), 633–646. https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1327181

Ilham, J., Hasan Harun, E., Yunus Dako, A., & Tamu, Y. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Desa Bendungan sebagai Desa Digital. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, 5(2), 1518–1524. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3019

Kemendesa. (2026). Apa Itu Sistem Informasi Desa. https://sid.kemendesa.go.id/

LAN RI. (2020). Modul Akuntabilitas. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Lumbanraja, A. D. (2020). Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi. Administrative Law & Governance Journal, 3(2), 220–231.

Mardinata, E., Dwi Cahyono, T., & Muhammad Rizqi, R. (2023). Transformasi Digital Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID): Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat. PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 73–81.

Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). Jurnal Ilmu Administrasi, 11(2), 101–112.

Nababan, S. (2021). Pelayanan Informasi untuk Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi Dan Komunikasi, 5(1), 24–38. https://doi.org/10.56873/jimik.v5i1.152

Nurdianti, D. A., Nuradhawati, R., & Sufianto, D. (2025). Strategi Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa. Prinsip, 2(1), 316–330. https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i1.4741

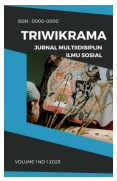
Perlaviciute, G., & Squintani, L. (2020). Public Participation in Climate Policy Making: Toward Reconciling Public Preferences and Legal Frameworks. One Earth, 2(4), 341–348. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.03.009

Pramana, I. G. A., Sulastri, N. L. P., & Wicaksan, I. K. A. (2025). Implementasi Sistem Informasi Desa untuk Meningkatkan Transparansi dan Pelayanan Publik di Desa Tertinggal. Journal of Community Action, 1(2), 35–41.

Rifa'i, M., & Arifin, S. (2026). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Hukum Administrasi Negara. Law and Nation (JOLN), 4(3), 282–289.

Russo Rumimpunu, S., E Tampi, J. R., & Londa, V. Y. (2021). Penerapan E-Government Dalam Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik. MDK Juli, 5.

Satyawati, S. Q., & Fitria, Y. (2025). Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Untuk Good Governance di Kecamatan Teluk Bayur. Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas, 5(1), 7–22. https://doi.org/10.35912/jastaka.v5i1.5147



Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sulistyowati, F., Tyas, H. S., Dibyorini, & Puspitasari, C. (2021). Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) untuk Mewujudkan Smart Village Di Kalurahan Panggungharjo Sewon Bantul DI Yogyakarta. Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi, 23(1), 213–226.

Suwita, F. S., Fadli, W. N., Suhendra, A., & Sulthoni, F. Z. (2023). Implementation of Waterfall Method in Designing Website-Based Discussion Forums. International Journal of Design, 3, 11–18.

United Nations. (2022). E-Government Survey 2022. https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2022

Yunita, S., & Idrus, M. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Jurnal SELAMI IPS, 16(1), 62–67.